

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani. Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintahan daerah sebagai sistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR1999 tentang Garis Besar Haluan Negara, bahwa 2 kebijakan umum pembangunan daerah diarahkan pada upaya untuk bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kebijakan umum lainnya diarahkan pada upaya mempercepat pembangunan daerah yang efektif dan kuat dengan memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Otonomi Daerah ditetapkan secara utuh pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang diselenggarakan atas dasar otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah, menuntut adanya pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan manusia dengan memperhatikan faktor-faktor alamiah berupa keadaan iklim, relief, luas wilayah, sumber daya alam, atau

tanah yang subur. Pada dasarnya masalah pengembangan wilayah ditandai dengan perbedaan fenomena antara lain dalam hal pertumbuhan penduduk, struktur pekerjaan, pendidikan, transportasi, jumlah bangunan yang bertambah dan juga disertai dengan terjalannya ruang dengan kehidupan bersama akibat yang nampak pada perubahan sosial ekonomi dan budaya.

Perkembangan suatu daerah pasti akan terjadi. Perkembangan ini dapat membawa dampak positif (kemajuan), tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya perkembangan juga bisa membawa dampak yang negative (kemunduran). Seiring dengan perjalanan waktu, suatu wilayah mengalami perkembangan sebagai akibat dari penambahan penduduk. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah, kondisi itu tergantung pada aspek fisik dan nonfisik (sosial). Secara fisik perkembangan suatu wilayah dapat dicirikan dari banyaknya jumlah penduduk yang semakin bertambah dan padat, bangunan-bangunannya yang semakin luas serta semakin lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi (Branch dalam Koestoer 1996).

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan memperoleh status kabupaten definitife sejak Tahun 2002 berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 2002 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Aceh Timur wilayah III menjadi kabupaten, memiliki posisi letak geografis yang cukup strategis dalam kerangka sistem transportasi regional, karena dilalui jalur utama jalan darat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara yang berjarak kurang lebih 136 Km dari Kota Medan Sumatera Utara dan merupakan pintu gerbang memasuki Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tamiang memiliki luas wilayah 1.957,02 km², yang terdiri dari 12 kecamatan dan 213 kelurahan/desa.

Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu kabupaten termuda di Provinsi Aceh yang lahir dari proses perjalanan panjang aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan, dewasa ini tengah berubah dan berkembang cukup pesat. Perubahan ini antara lain terlihat di sepanjang kawasan jalur Lintas Sumatera, seperti di Kecamatan Kuala Simpang dan Kecamatan Karang Baru, yang ditandai dengan terjadinya pertumbuhan penduduk dan kawasan terbangun yang relatif tinggi di wilayah ini jika dibandingkan dengan sebelumnya yang disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2009 berjumlah 250.329 jiwa, Tahun 2010 berjumlah 251.914 jiwa, dan Tahun 2011 berjumlah 257.681 jiwa. (BPS Aceh Tamiang).

Perkembangan fisik kawasan dan penambahan penduduk ini berdampak terhadap kebutuhan ruang dan aktivitas kegiatan lainnya di daerah yang bersangkutan. Hal tersebut telah menunjukkan cukup pesatnya pertumbuhan dan perkembangan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pertambahan penduduk menuntut adanya perkembangan sarana dan prasarana serta pembangunan. Pertambahan penduduk dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk secara alami dan arus migrasi. Pertambahan penduduk tanpa disertai kontrol untuk mengatur jumlah perkembangan yang diinginkan, hanya akan menimbulkan problema sosial dan ekonomi penduduk. Pertambahan penduduk yang besar dari tahun ketahun memerlukan penambahan investasi, sarana prasarana dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja masalah yang rumit bagi pemerintah setempat dalam usaha membangun dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan penduduknya (Sadyohutomo 2008).

Pertambahan penduduk tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan dan perkembangan tata ruang dalam hal sarana dan prasarana yang juga mengalami perkembangan seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, air bersih, jaringan jalan, dan sarana prasarana lainnya yang akan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun seiring dengan besarnya jumlah penduduk yang terus bertambah namun tidak jarang dari berbagai sarana dan prasarana yang tersedia mencukupi menyebabkan tidak seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya. Berangkat dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang perkembangan sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2006-2011.

B. Identifikasi Masalah

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur terbentuk berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 2002 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Aceh Timur wilayah III menjadi kabupaten (Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur). Pengembangan wilayah Kabupaten hasil pemekaran ini membawa dampak positif dan negatif. Dari perkembangan wilayah timbul beberapa masalah yaitu pertumbuhan penduduk dan perkembangan sarana dan prasarana.

Pertambahan jumlah penduduk akan membawa perubahan-perubahan sarana dan prasarana dalam kehidupan dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang terus berkembang dan menuntut adanya perkembangan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan dan menyeimbangkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari

tahun ke tahun agar semua masyarakat dapat terlayani sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah perkembangan sarana prasarana yaitu sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana transportasi, prasarana jaringan listrik, prasarana jaringan jalan, dan prasarana air bersih.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas diperlukan pembatasan masalah agar permasalahan dapat terfokus. Maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah perkembangan sarana yang meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana transportasi serta prasarana yang meliputi prasarana jaringan listrik, prasarana jaringan jalan dan prasarana air bersih.

D. Perumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2006-2011.
2. Bagaimana perkembangan sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana transportasi, prasarana jalan, prasarana listrik, dan prasarana air bersih dari tahun 2006 – 2011.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2006-2011.
2. Untuk mengetahui perkembangan sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi, prasarana jalan, prasarana listrik, dan prasarana air bersih dari tahun 2006 – 2011.

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan bagi pemerintah setempat untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi penulis lain untuk meneliti masalah yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda.
3. Untuk menambah wawasan bagi penulis dalam menulis karya ilmiah berbentuk skripsi.